PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019

Laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Surakarta Tahun 2019

Kata Pengantar

Assalaamu‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Surakarta Tahun 2019. Keterbukaan informasi sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi, dengan keterbukaan akan terbangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dengan Badan Publik, akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang kredibilitasnya terakui.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan PPID Kota Surakarta Tahun 2019.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung laporan ini, kekurangan dan koreksi akan selalu diterima untuk perbaikan laporan berikutnya dan semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat semua pihak.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta 1
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 9
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik 21
Bab IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 29
Bab V Capaian PPID Kota Surakarta 33
Bab VI Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 37
Bab VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 41
Lampiran 45

Bab I
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta

Bab I
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Keberadaan Undang-Undang tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan

akses informasi publik, Pemerintah Kota Surakarta juga telah membentuk PPID.

Pembentukan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surakarta Nomor 180/134 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kota Surakarta. Dalam Keputusan Walikota tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta. PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Sesuai dengan Keputusan Walikota tersebut, PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media, antara lain menggunakan telepon/faksimile, email, website PPID.

Kewenangan PPID adalah sebagai berikut.

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/kompunen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Sesuai dengan kewenangannya, PPID telah menetapkan daftar informasi publik yang dapat diakses publik dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta Nomor 800/020/V/2019 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019.

Selain itu, PPID juga telah menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta Nomor 800/019/V/2019 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dijadikan panduan dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

PPID di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah.

Tugas dari PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
3. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID.

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan. dan kelurahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PPID telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Berikut ini adalah Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh PPID Kota Surakarta.

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta selaku PPID Utama berkomitmen untuk :

1. Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang akurat dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku;
2. Menyediakan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses;
3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

Surakarta, Mei 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA
Selaku PPID Utama

KENTIS RATNAWATI, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670402 199008 2 001

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 1.1 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, PPID Utama Kota Surakarta menetapkan 5 (lima) SOP terdiri dari:

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

Bab II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bab II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, akan diarahkan kepada PPID Pembantu di OPD Kota Surakarta.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Surakarta memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon (0271)2941667, faksimili (0271)2931669, surat elektronik (email/ppid@webmail. surakarta.go.id), website (http://ppid.surakarta.go.id dan http://surakarta.go.id), media sosial seperti *Facebook* (pemerintahkotasurakarta), dan *Twitter* (@pemkot_solo), serta aplikasi android *Solo Destination*.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik dalam

bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID yang terdapat di lantai 3 Gedung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Surakarta.

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 2.1 Ruang pelayanan informasi PPID Kota Surakarta

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 wib s.d. 16.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, seperti email dan permintaan online melalui website.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kota Surakarta juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kota Surakarta (http://ppid.surakarta.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kota Surakarta yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Open Data Kota Surakarta di alamat http://data.surakarta.go.id, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing masing OPD.

Dalam situs website PPID Kota Surakarta, masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kota Surakarta, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kota Surakarta, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta.

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan di Gedung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan

Persandian Kota Surakarta saja namun pelayanan-pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Kota Surakarta, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu sebanyak 87 perangkat daerah.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Surakarta dikelola Bidang Statistik, dan dibantu Pranata Komputer yang ada di Diskominfo SP dalam pelaksanaan tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

C. Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dibebankan pada DPA tahun anggaran 2019 Diskominfo SP Bidang Statistik. Anggaran tersebut, antara lain digunakan untuk rapat-rapat koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan PPID Pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan rapat-rapat yang dilakukan oleh PPID Kota Surakarta tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Kegiatan PPID Kota Surakarta Tahun 2019

No	Tanggal	Acara
1	21 Februari 2019	Rakor Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
2	25 April 2019	Rakor Tindak Lanjut Penyerahan Pengelolaan PPID
3	26 April 2019	Rapat Pembahasan Informasi yang dikecualikan untuk DIP
4	30 April 2019	Rakor Persiapan Penilaian PPID Tingkat Provinsi Jawa Tengah
5	2 Mei 2019	Kegiatan Konsolidasi data dan Informasi PPID
6	3 Mei 2019	Rakor Penentuan Daftar Informasi yang dikecualikan dari Perangkat Daerah Kota Surakarta (Uji Konsekuensi)
7	9 Mei 2019	Evaluasi Data Informasi Publik dari PPID Pembantu
8	13 Mei 2019	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Desk Data dan Informasi dari PPID Pembantu
9	15 Juli 2019	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data untuk Evaluasi Website PPID
10	22 Juli 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Website PPID untuk Evaluasi
11	23 Juli 2019	Updating Website untuk Evaluasi PPID Tahun 2019
12	24 Juli 2019	Cheking akhir website untuk evaluasi PPID tahun 2019
13	2 September 2019	Rapat Koordinasi Pengelolaan PPID

No	Tanggal	Acara
14	4 September 2019	Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi dari PATTIRO kepada PPID Pembantu
15	12 September 2019	Rapat Koordinasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Jawa Tengah Tahun 2019
16	16 September 2019	Rapat Pengisian SAQ PPID Utama
17	17 September 2019	Rapat Tindak Lanjut Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Pubik se-Jawa Tengah Tahun 2019
18	25 September 2019	Rapat Koordinasi Pengisian SAQ utuk pemeringkatan PPID se-Jawa Tengah Tahun 2019
19	27 September 2019	Lanjutan Pengisian SAQ utuk pemeringkatan PPID se-Jawa Tengah Tahun 2019
20	9 Oktober 2019	Workshop PPID
21	24 Oktober 2019	Rapat Persiapan visitasi dalam pemeringkatan PPID se-Jawa Tengah Tahun 2019
22	12 November 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Uji Publik Pemeringkatan PPID Jawa Tengah Tahun 2019
23	18 November 2019	Rapat Internal Pembahasan Undangan Uji Pubik Badan Publik Tahun 2019

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan PPID adalah sebagai berikut.

a. Konsolidasi Data dan Pertemuan PPID

Kegiatan Konsolidasi data dan Informasi PPID dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019.

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 2.2 Konsolidasi Data dan Pertemuan PPID Tahun 2019

b. Evaluasi Data Informasi Publik dari PPID Pembantu

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 2.3 Desk Penentuan Daftar Informasi Publik dari PPID Pembantu Kota Surakarta Tahun 2019

c. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 2.4 Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2019

d. Workshop PPID

Workshop PPID dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Slamet Haryanto, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret.

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 2.5 Workshop PPID Tahun 2019

Bab III
Rincian
Pelayanan
Informasi Publik

Bab III
Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Mekanisme pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor DISKOMINFOSP/BID.STAS/06 yang dibuat tanggal 3 Mei 2019 dan terakhir direvisi tanggal 17 Oktober 2019. Mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut.

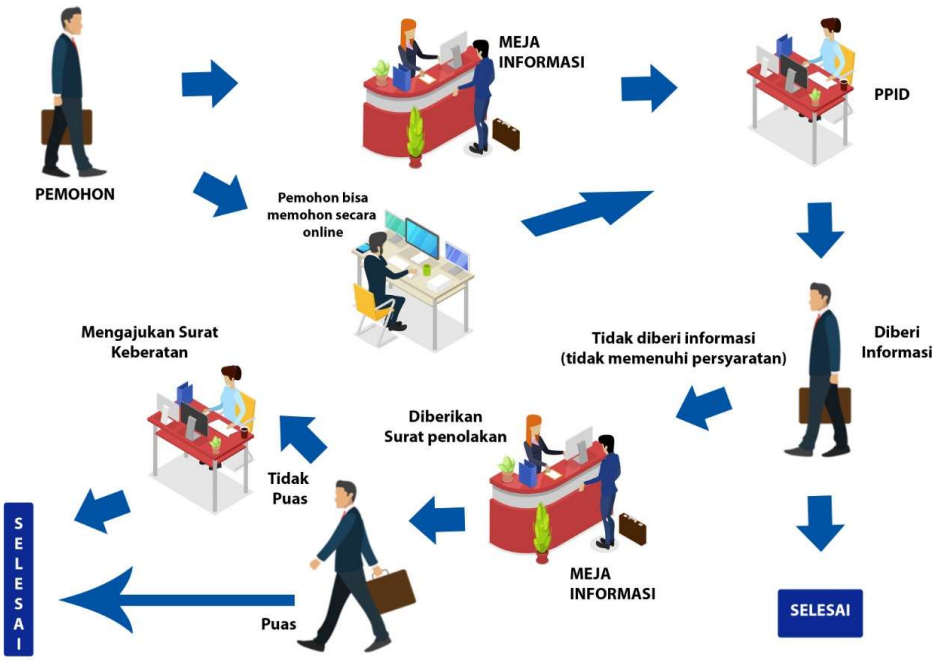

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 3.1 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik (hadir langsung atau via online), jika untuk penelitian/survey maka harus memenuhi syarat izin dari BAPPPEDA dan KESBANGPOL.
2. Petugas menerima permohonan informasi :
    a. Mengisi formulir permohonan informasi publik (jika hadir langsung).
    b. Memberikan nomor urut permohonan.
    c. Cek kelengkapan permohonan.
    d. Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID dan mengarsip.
3. PPID akan cek informasi sesuai dengan permohonan :
    a. Jika tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diberikan maksimal 10 hari kerja.
    b. Jika tidak tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang menangani data yang diminta, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja.
4. Petugas
    a. Pemohon diberi info sesuai permohonan.
    b. Jika tidak diberikan permohonan (tidak memenuhi persyaratan) maka akan diberikan surat penolakan dan pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai SOP penanganan keberatan infomrmasi publik.

Pada tahun 2019, PPID Utama Kota Surakarta telah menerima 28 pemohon informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Desk Layanan Informasi Publik sebanyak 0 pemohon.
2. Melalui Website PPID (http://ppid.surakarta.go.id) sebanyak 23 pemohon.
3. Melalui email PPID (ppid@surakarta.go.id) sebanyak 5 pemohon.

Tabel 3.1 Laporan Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Utama Kota Surakarta Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	3
6	Juni	2
7	Juli	2
8	Agustus	4
9	September	6
10	Oktober	7
11	November	3
12	Desember	1
	JUMLAH	**28**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24, maka dari 28 pemohon informasi publik yang diterima oleh PPID Utama Kota Surakarta, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kategorisasi Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Utama Kota Surakarta Tahun 2019

No	Ketegori	Jumlah
1	Perseorangan	23
2	Kelompok masyarakat	0
3	Lembaga Swadaya Masyarakat	5
4	Organisasi masyarakat	0
5	Partai politik	0
6	Badan publik lainnya	0
	JUMLAH	28

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Berdasarkan Tabel 3.2, kategori pemohon informasi publik terbanyak adalah kategori perseorangan, yaitu 23 orang, sebagian besar adalah mahasiswa.

B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 26 ayat 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis (Pasal 26 ayat 11).

PPID Utama Kota Surakarta dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5,92 hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu pelayanan ini masih masuk dalam rentang waktu yang ditentukan.

Tabel 3.3 Laporan Waktu Pemenuhan Informasi Publik yang Diterima PPID Utama Kota Surakarta Tahun 2019

No	Bulan	Waktu Pemenuhan (Hari)
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	6,67
6	Juni	9,50
7	Juli	6,50
8	Agustus	2,75
9	September	8,00
10	Oktober	5,57
11	November	4,33
12	Desember	4,00
	Rata-Rata	5,92

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2019 ini, PPID Utama Kota Surakarta menerima 28 pemohon informasi dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

PPID Utama Kota Surakarta untuk tahun 2019 menerima 28 (dua puluh delapan) pemohon informasi. Dari pemohon yang mengajukan permohonan informasi terdapat 1 (satu) pemohon informasi ditolak karena permohonan informasi yang diminta bukan merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Surakarta.

Bab IV
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bab IV
Rincian Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Kota Surakarta memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Bab V
Capaian PPID
Kota Surakarta

Bab V
Capaian PPID Kota Surakarta

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Award Jateng 2019 kategori Badan Publik menuju Informatif. Penghargaan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rangkaian kegiatan PPID Kota Surakarta dalam mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

a. Visitasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 5.1 Visitasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

b. Uji Publik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 5.2 Paparan Walikota Surakarta dalam Uji Publik Badan Publik Kabupaten/Kota Tahun 2019

c. Penerimaan Anugerah KIP Award 2019

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2019

Gambar 5.3 Wakil Walikota Surakarta menerima anugerah KIP Award 2019 dengan kategori Badan Publik menuju Informatif

Bab VI
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Bab VI
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu OPD;
2. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi serta terbatasnya personil bidang teknologi informasi terkait pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu;
3. Pengelolaan data PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
4. Belum adanya ruang pelayanan permohonan informasi di PPID Pembantu;
5. Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal;
6. Peran PPID Pembantu yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.surakarta.go.id dan media sosial;
7. Adanya pemohon informasi yang belum memahami SOP pelayanan permohonan informasi.

Bab VII
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bab VII
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik kepada PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Menambahkan sub menu PPID dalam website PPID Pembantu;
3. Membuat aplikasi untuk pemenuhan permohonan data dan informasi pada PPID Utama dan PPID Pembantu;
4. Menyediakan ruang pelayanan permohonan informasi di PPID Pembantu;
5. Mengoptimalkan database yang terpusat dan memanfaatkan *portal open data* dan *single data system* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu;
6. Meningkatkan peran PPID Pembantu untuk aktif mengupdate informasi dan memberikan pelayanan permohonan informasi;
7. Pembuatan tutorial permohonan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ditampilkan di media publikasi.

Demikian laporan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kota Surakarta.

Surakarta, 16 Januari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA
Selaku
PPID UTAMA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KENTIS RATNAWATI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670402 199008 2 001

Lampiran

LAMPIRAN 1

WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 180/134 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang berguna bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa keterbukaan informasi publik diperlukan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

c. bahwa untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan pelayanan informasi terkait kinerja Pemerintah Kota Surakarta;

d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPID berwenang:

a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
c. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka

Keputusan ...

Keputusan Walikota Nomor 042.05/8.9/1/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 180/134 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KOTA SURAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta	Melaksanakan Tugas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 180/134 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No.	PERANGKAT DAERAH	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
3.	Inspektorat	Inspektur	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
4.	Dinas Pendidikan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
5.	Dinas Kesehatan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
8.	Dinas Sosial	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
11.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
15.	Dinas Perhubungan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu

18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
19.	Dinas Kebudayaan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
21.	Dinas Pariwisata	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
22.	Dinas Perdagangan	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
23.	Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
25.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
26.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Kepala	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
28.	Rumah Sakit Umum Daerah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
29.	Kecamatan Jebres	Camat	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
30.	Kelurahan Kepatihan Kulon	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
31.	Kelurahan Kepatihan Wetan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
32.	Kelurahan Sudiroprajan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
33.	Kelurahan Gandekan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
34.	Kelurahan Pucangsawit	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
35.	Kelurahan Jagalan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
36.	Kelurahan Sewu	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
37.	Kelurahan Purwodiningratan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
38.	Kelurahan Tegalharjo	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
39.	Kelurahan Jebres	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
40.	Kelurahan Mojosongo	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
41.	Kecamatan Laweyan	Camat	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu

42.	Kelurahan Panularan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
43.	Kelurahan Sriwedari	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
44.	Kelurahan Penumping	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
45.	Kelurahan Purwosari	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
46.	Kelurahan Bumi	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
47.	Kelurahan Laweyan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
48.	Kelurahan Sondakan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
49.	Kelurahan Pajang	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
50.	Kelurahan Kerten	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
51.	Kelurahan Jajar	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
52.	Kelurahan Karangasem	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
53.	Kecamatan Banjarsari	Camat	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
54.	Kelurahan Nusukan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
55.	Kelurahan Gilingan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
56.	Kelurahan Setabelan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
57.	Kelurahan Ketelan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
58.	Kelurahan Kestalan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
59.	Kelurahan Mangkubumen	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
60.	Kelurahan Manahan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
61.	Kelurahan Banyuanyar	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
62.	Kelurahan Punggawan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
63.	Kelurahan Keprabon	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
64.	Kelurahan Sumber	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
65.	Kelurahan Timuran	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
66.	Kelurahan Kadipiro	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
67.	Kelurahan Joglo	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu

68.	Kelurahan Banjarsari	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
69.	Kecamatan Pasarkliwon	Camat	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
70.	Kelurahan Gajahan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
71.	Kelurahan Baluwarti	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
72.	Kelurahan Kampung Baru	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
73.	Kelurahan Kedunglumbu	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
74.	Kelurahan Sangkrah	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
75.	Kelurahan Kauman	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
76.	Kelurahan Joyosuran	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
77.	Kelurahan Semanggi	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
78.	Kelurahan Mojo	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
79.	Kelurahan Pasarkliwon	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
80.	Kecamatan Serengan	Camat	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
81.	Kelurahan Jayengan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
82.	Kelurahan Kratonan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
83.	Kelurahan Joyontakan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
84.	Kelurahan Danukusuman	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
85.	Kelurahan Tipes	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
86.	Kelurahan Kemlayan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu
87.	Kelurahan Serengan	Lurah	Melaksanakan Tugas selaku PPID Pembantu

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN 2

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

NO	TGL	NAMA	Tipe Pemohon	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAH	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						YA	TIDAK											
1	15 Mei 2019	Andreas Meyka Aisatya	Perseorangan	- Laporan Perubahan-Sado Anggaran Lebih TA 2017 - Laporan Operasional TA 2017 - Laporan Perubahan Ekuitas TA 2017 - Laporan Arus Kas TA 2017 - CaLK TA 2017	Pemenuhan Tugas Audit Sektor Pemerintah	V			V	V		V	TERPENUHI	-	Kamis, 16 Mei 2019	Kamis, 16 Mei 2019	Gratis	Email
2	15 Mei 2019	Rino Indro	Perseorangan	Mohon Data Penduduk Kota Surakarta		V			V	V		V	TERPENUHI	-	Rabu, 29 Mei 2019	Rabu, 29 Mei 2019	Gratis	Email
3	26 Mei 2019	Prabasusatya (BP2BT)	Perseorangan	Untuk mendapatkan data profil kota surakarta	Bahan laporan BP2BT	V			V	V		V	TERPENUHI	-	Kamis, 13 Juni 2019	Kamis, 13 Juni 2019	Gratis	Email
4	1 Juni 2019	Nur Hasiyah	Perseorangan	Pengumuman penerimaan pegawai non ASN BLUD Puskesmas Dinkes Surakarta	Saya berasal dari luar Surakarta, mendaftar Non ASN tetapi tidak tahu hasilnya diterima atau tidak administrasinya delan di papan pengumuman dinkes Surakarta. Mohon Bantuannya Pak/Bu. Terimakasih.	V				V	V		TERPENUHI	-	Jumat 21 Juni 2019	Jumat 21 Juni 2019	Gratis	Email
5	25 Juni 2019	Christian Pramudya (PPRBM)	Lembaga Swadaya Masyarakat	Realisasi APBD 2016,2017,2018 Kota Surakarta, RPJMD Kota Surakarta, Penjabaran APBD 2019, RKPD 2019	Sebagai bahan untuk pelatihan terkait dengan penganggaran yang berpihak terhadap difabel di kota Surakarta (Pelatihan Budget Tracking)	V			V	V		V	TERPENUHI	-	Senin, 8 Juli 2019	Senin, 8 Juli 2019	Gratis	Email
6	23 Juli 2019	Yesika Prabawaningpuri	Perseorangan	(1) Data Kekerasan Anak di Kota Surakarta Tahun 2011-2017 (2) Data tentang Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Anak di Kota Surakarta Tahun 2011-2018	Untuk Pra-Survey Skripsi	V			V	V		V	TERPENUHI	-	Senin, 5 Agustus 2019	Senin, 5 Agustus 2019	Gratis	Email
7	24 Juli 2019	An Syahril Ramadhan	Perseorangan	Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) Kota Surakarta	Bahan membuat berita dan kajian	V				V	V		TERPENUHI	-	Selasa, 30 Juli 2019	Selasa, 30 Juli 2019	Gratis	Mengambil Langsung
8	5 Agustus 2019	Ganda Sibarani	Perseorangan	Dokumen Masterplan Smart City Pemkot Surakarta dan dokumen RPJMD Teknokratik 2022-2027	Penelitian S2	V			V	V		V	TERPENUHI	-	Selasa, 6 Agustus 2019	Selasa, 6 Agustus 2019	Gratis	Mengambil Langsung
9	14 Agustus 2019	Rintyas Chandra Irawan	Perseorangan	permohonan data citra resolusi tinggi Kota Surakarta	Guna melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir pada Universitas Diponegoro dengan judul "Analisa tingkat kekumuhan pada permukiman menggunakan metode geographically weighted regression (GWR)"	V				V		V	TERPENUHI	-	Senin, 19 Agustus 2019	Senin, 19 Agustus 2019	Gratis	Mengambil Langsung

NO	TGL	NAMA	Tipe Pemohon	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAH	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						YA	TIDAK											
10	20 Agustus 2019	Marwan Zainuddin	Perseorangan	Selamat Malam. Maaf mau tanya kalau daftar Pemadam Kebakaran atau Satpol PP bagaimana caranya? Trimakasih	mencari pekerjaan	V				V	V		TERPENUHI	-	Kamis, 22 Agustus 2019	Kamis, 22 Agustus 2019	Gratis	Mengambil Langsung
11	30 Agustus 2019	Widi Nugroho (PATTIRO Semarang)	Lembaga Swadaya Masyarakat	(1) Dokumen Penjabaran APBD Kota Surakarta Tahun 2017 dan 2018 (2) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017 dan 2018 (3) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017 dan 2018 (4) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2017 dan 2018	Advokasi pengawasan implementasi kebijakan dan anggaran telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.	V				V			TERPENUHI	-	Jumat, 6 September 2019	Jumat, 6 September	Gratis	Mengambil Langsung
12	09-Sep	Iva Hana Pertiwi, S.Psi (KPSI Simpul Solo Raya)	Lembaga Swadaya Masyarakat	Permohonan Data SOP dan SPM Puskesmas	memohon data berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari seluruh Puskesmas yang ada di Kota Surakarta	V				V			TERPENUHI	-	Senin, 23 September 2019	Senin, 23 September 2019	Gratis	Email
13	17-Sep-19	Galih Saputro (GERKATIN)	Lembaga Swadaya Masyarakat	(1) Daftar BUMD di Kota Surakarta (2) Jumlah karyawan diseliap BUMD Kota Surakarta (3) Jumlah karyawan difabel disetiap BUMD Kota Surakarta (4) Daftar program pelatihan kerja dan peserta untuk difabel tahun 2014-2019	Mengkaji dan menganalisis implementasi ketenagakerjaan inklusif	V			V	V			TERPENUHI	-	Senin, 30 September 2019	Senin, 30 September 2019	Gratis	Email
14	17-Sep-19	Galih Saputro (GERKATIN)	Lembaga Swadaya Masyarakat	(1) Daftar sekolah inklusi di Kota Surakarta (2) Jumlah dan sebaran Guru Pendidikan Khusus (GPK) disekolah inklusi Kota Surakarta (3) Jumlah dan sebaran siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) disekolah inklusi Kota Surakarta (4) DPA & RKA yang terkait dengan pendidikan inklusi	Mengkaji dan menganalisa penyelenggaraan pendidikan inklusi sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Difabel Tahun 2017 s.d. 2022	V			V	V			TERPENUHI	-	Senin, 30 September 2020	Senin, 30 September 2020	Gratis	Email

NO	TGL	NAMA	Tipe Pemohon	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAH	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						YA	TIDAK											
15	21-Sep-19	Rima Taza	Perseorangan	Mencari informasi terkait kpd kota surakarta Ta. 2015-2016-2017	Untuk Tujuan mata kuliah dengan matkul SAP (Sistem Akutansi Pemerintahan) mencari data laporan keuangan pemda yang lkpdnya mendapat opini dengan status WTP selama tiga tahun berturut-turut dari BPK	V			V	V	V	V	TERPENUHI	-	Senin, 23 September 2019	Senin, 23 September 2019	Gratis	Email
16	26-Sep-19	Apprilia Silva P	Perseorangan	(a) Rincian Anggaran Rancangan Proyek Pembangunan Koridor Jalan Jend. Sudirman sampai ke Arah Balaikota tahun 2019. (b) Rincian rancangan/rencana anggaran dana dan alur proyek pembangunan gedung wayang dan ketoprak di balaikambang tahun 2019	Sebagai bahan tugas mata kuliah	V				V		V	TERPENUHI	-	Rabu, 9 Oktober 2019	Rabu, 9 Oktober 2019	Gratis	Datang langsung
17	27-Sep-19	Oliva Sinaga	Perseorangan	Data Ketinggian serta lokasi Tower BTS dan Sutet di wilayah Surakarta dan sekitarnya	Data tersebut akan menjadi data pencukung skripsi saya yang berjudul "Analisis 3D Modelling untuk Deteksi Obstacle Zona KKOP Bandara Adi Soemarmo" Screen reader support enabled	V			V	V	V		TERPENUHI	-	Jumat, 11 Oktober 2019	Jumat, 11 Oktober 2019	Gratis	Email
18	4 Oktober 2019	Tommy Wibowo	Perseorangan	Perkenalkan saya Tommy mahasiswa Universitas Sebelas Maret, saya mau bertanya mengenai alur perizinan untuk survei sampe daging dan bakso di wilayah Kota Surakarta untuk tujuan penelitian. Bagaimana sistematika perizinannya? Terimakasih.	Mencari tau alur perizinan survei untuk penelitian	V			V		V		TERPENUHI	-	Senin, 14 Oktober 2019	Senin, 14 Oktober 2019	Gratis	Email
19	7 Oktober 2019	Nikmatuz Zuhra Ainy	Perseorangan	Meminta data jumlah total keluhan masyarakat serta keluhan masyarakat terkait dengan Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta dari 5 tahun terakhir atau dari tahun 2015	Tugas Kuliah	V			V		V		TERPENUHI	-	Jumat, 18 Oktober 2019	Jumat, 18 Oktober 2019	Gratis	Email
20	15 Oktober 2019	Nikmatuz Zuhra Ainy	Perseorangan	Meminta data laporan pengaduan masyarakat lengkap (seperti hal apa dan OPD yang sering dilaporkan) tahun 2016-2019 Dan data keluhan PJU tahun 2016-2019	Tugas Kuliah	V			V		V		TERPENUHI	-	Kamis, 24 Oktober 2019	Kamis, 24 Oktober 2019	Gratis	Email

NO	TGL	NAMA	Tipe Pemohon	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						YA	TIDAK											
21	15 Oktober 2019	Olivia Siraga	Perseorangan	Kelanjutan dari jawaban permintaan informasi sebelumnya tanggal 27 September 2019, Saya mohon informasinya, apakah data tower BTS tersebut bisa diminta? Jika iya saya mohon infonya bagaimana tahapan permohonan datanya? terimakasih.	Data tersebut akan menjadi data pendukung skripsi saya yang berjudul "Analisis 3D Modelling untuk Deteksi Costacle Zona KKOP Bandara Adi Soemarmo" Screen reader support enabled	V			V		V		TERPENUHI	-	Senin, 21 Oktober 2019	Senin, 21 Oktober 2019	Gratis	Email
22	22 Oktober 2019	Nikmatuz Zuhra Ainy	Perseorangan	Meminta data laporan pengaduan masyarakat Per Unit Kerja melalui website ULAS Kota Surakarta tahun 2017-2019 (saya meminta datanya karena diwebsite data.surakarta.go.id hanya ada data tahun 2017)	Tugas kuliah, bukan untuk penelitian	V			V		V		TERPENUHI	-	Kamis, 31 Oktober 2019	Kamis, 31 Oktober 2019	Gratis	Email
23	25 Oktober 2019	Nikmatuz Zuhra Ainy	Perseorangan	Meminta data jumlah total keluhan masyarakat terkait Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta tahun 2016-2017 (maaf saya meminta data lagi karena kemarinbaru dikasih yang tahun 2018-2019)	Tugas kuliah (bukan penelitian)	V			V		V		TERPENUHI	-	30 Oktober 2019	30 Oktober 2019	Gratis	Email
24	28 Oktober 2019	Muhammad Ridwan Ash Shidiqi	Perseorangan	Data Statistik wisatawan mancanegara dan domestik dalam kunjungan ke Surakarta untuk kegiatan MICE Data Statistik event MICE di Surakarta selam 5 tahun terakhir	Menyusun Skripsi S1	V			V	V	V		TERPENUHI	-	Rabu, 30 Oktober 2019	Rabu, 30 Oktober 2019	Gratis	Email
25	11-Nov-19	Istianawati	Perseorangan	Data jumlah usaha kecil menengah per kelurahan di Kota Surakarta	Mengetahui jumlah usaha kecil menengah per kelurahan di Kota Surakarta dan selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi tugas Screen Reader Support Enabled	V			V	V	V		TERPENUHI	-	Selasa, 19 November 2019	Selasa, 19 November 2019	Gratis	Email
26	16-Nov-19	Mian	Perseorangan	Informasi CPNS Pemkot Surakarta	Melamar CPNS	V			V	V	V		TERPENUHI	-	Rabu, 20 November 2019	Rabu, 20 November 2019	Gratis	Email
27	19-Nov-19	Handah Qonita	Perseorangan	Data jumlah pelanggaran lalu lintas dan jumlah pungli dalam tilang di Kota Surakarta tahun 2016 hingga 2019	Tugas Kuliah			V					DITOLAK	Data yang diminta bukan menjadi tugas dan kewenangan	-	-	-	-

NO	TGL	NAMA	Tipe Pemohon	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAH	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						YA	TIDAK											
26	9 Desember 2019	Wahyu Dwi Laksono	Perseorangan	Mohon sebutkan potensi keunggulan daerah baik pariwisata, industri, kerya seni/kerajinan, dan makanan khas dari lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta	Untuk mengetahui potensi keunggulan daerah yang dimiliki setiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian mengenai keunggulan poten daerah Kota Surakarta	V			V		V		TERPENUHI	-	Jumat, 13 Desember 2019	Jumat, 13 Desember 2019	Gratis	Email

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta 57111
Telp. (0271) 2931669 Fax. (0271) 2931669
Website : http://ppid.surakarta.go.id
Email : ppid@surakarta.go.id